

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang, bahkan pemerintah mewajibkan warganya untuk mendapat hak Pendidikan selama 12 tahun bahkan diharapkan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu bangku perkuliahan. Secara sederhana pendidikan bisa menjadi sarana individu untuk terhindar dari kebodohan, semakin tinggi Pendidikan seseorang semakin tinggi pengetahuan yang akan di dapat.

Masalah pendidikan di Indonesia yang paling sering kita jumpai adalah biaya pendidikan yang terbilang cukup mahal, karena untuk menjalankan proses pendidikan membutuhkan fasilitas-fasilitas Pendidikan seperti buku, alat tulis, seragam sekolah dan transportasi. Bagi masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi, mereka akan kesulitan untuk menjalankan pendidikan dan memilih bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dari pada harus melanjutkan pendidikannya.

Laporan Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dalam (Katadata.co.id, 2022) menunjukkan ada 75.303 orang anak yang putus sekolah padatahun 2021. Pada tingkat sekolah dasar (SD) ada 38.716 orang, tingkat sekolah menengah pertama (SMP) ada 15.042 orang, dan tingkat sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan ada 22.085 orang. Di Pematangsiatar sendiri dalam (Hodriani, 2020) tingkat Pendidikan anak usia 6-18 tahun ada sebanyak 36,67% anak yang tidak melanjutkan sekolahnya dan lebih memilih bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Tabel 1.1 Angka Partisipasi Murni tahun 2020-2024 Kota Pematangsiantar

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (Persen)		
	2020	2022	2024
SD	97,43	99,77	99,11
SMP	88,44	82,96	84,29
SMA	67,06	76,68	53,20
JUMLAH	83,31	86,47	78,86

Sumber : siantarkota.bps.go.id

Bedasarkan Angka partisipasi murni Kota Pematangsiantar persentase anak yang dapat mengakses Pendidikan pada tahun 2024 hanya 78,86% berarti ada 21,14% anak yang tidak dapat mengakses Pendidikan.

Untuk meminimalisir permasalahan kesejahteraan sosial, khususnya kemiskinan yang akan membatasi hak setiap orang untuk mendapat Pendidikan maka pemerintah Indonesia melalui kementerian sosial mengeluarkan Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial yang merupakan salah satu instansi pemerintahan yang bergerak di bidang sosial. Program ini berupaya untuk mengembangkan sistem perlindungan sosial terhadap warga miskin di Indonesia.

Program harapan keluarga (PKH) merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga penerima bantuan (KPM) yang telah terdaftar dalam Basis Data Terpadu (BDT) pengelolaan masyarakat miskin dan diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial. Program ini diharapkan mampu berkontribusi dalam membantu percepatan pembangunan berkelanjutan. *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan kelanjutan dari *Melenium Development Goals* (MDGs) yang mempunyai 17 tujuan yang saling terikat dengan tujuan “*to leave no one behind*” pada tahun 2030. Yang di dukung melalui PKH, yaitu mengatasi mengatasi penduduk miskin ekstrim dan kelaparan

melalui akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Sosial nomor. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

PKH diterapkan sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang nomor. 40 tahun 2004 tentang jaminan sosial, Undang-Undang nomor. 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Inpres nomor. 3 tahun 2010 tentang program pembangunan yang berkeadilan, Perpres nomor. 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan dan Undang-Undang nomor. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Program ini memberikan bantuan berupa uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan mengikuti persyaratan yang diwajibkan. Persyaratan itu terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yaitu kesehatan dan pendidikan. Sasaran dari program ini yakni ibu hamil, ibu menyusui, memiliki anak balita dan anak usia sekolah setingkat SD-SMP. Penerima bantuan ini adalah ibu atau wanita dewasa yang mengurus anak pada rumah tangga yang bersangkutan. Namun apabila tidak ada ibu, bibi, nenek atau kakak perempuan dapat menjadi penerima bantuan.

Di Indonesia PKH pertama kali dilaksanakan di 7 provinsi pada tahun 2007 yang diluncurkan di Provinsi Gorontalo pada Juli 2007 sebagai tahap uji coba dengan harapan program ini berkesinambungan sampai pada tahun 2015 dan mampu untuk mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium (*Millenium Development Goals* atau MDGs). PKH terfokus pada dua komponen yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yaitu pada bidang kesehatan dan pendidikan. Kesehatan merupakan kunci untuk melakukan aktivitas dengan baik sebab dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jika

kesehatan terjamin pendidikan seseorang akan berjalan dengan baik. Dengan kualitas pendidikan yang layak dan bagus maka secara otomatis kualitas sumber daya manusia juga akan meningkat.

Namun perlu disadari bahwa tidak semua rakyat bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas. Lapisan masyarakat menengah kebawah banyak yang tidak bisa mengenyam pendidikan. Hal tersebut disebabkan mereka tidak memiliki biaya untuk mengakses pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan di Indonesia mengakibatkan keluarga miskin dengan terpaksa tidak menyekolahkan anak-anaknya. Di Pematangsitar dalam (Hodriani, 2020) ada 36,67% anak-anak berusia 6-18 tahun yang putus sekolah dan memilih untuk mencari pekerjaan untuk menopang kondisi keuangan keluarga demi kelangsungan hidup kedepannya.

Salah satu tujuan akhir PKH adalah meningkatkan angka partisipasi sekolah anak bagi anak-anak RTSM, khususnya SD/MI dan SMP/MTs, serta untuk mengurangi pekerja dibawah umur di Indonesia. Untuk mencapai tujuan ini, PKH pendidikan berupaya memotivasi RTSM agar mendaftarkan anak-anaknya ke sekolah-sekolah dan mendorong mereka untuk memenuhi komitmen kehadiran dalam proses belajar, minimal 85% dari hari efektif sekolah dalam sebulan, selama tahun ajaran berlangsung.

Program ini telah berjalan sesuai yang diharapkan, namun demikian tidak terlepas hambatan/ hal-hal yang tidak sesuai dengan program ini. Adapun persoalan yang berkenaan dengan PKH selama ini, yakni: pertama, mengenai kevalidan data kelayakan peserta PKH. Masyarakat mempersoalkan adanya peserta atau calon peserta PKH yang dinilai bukan RTSM, sementara pada saat

yang bersamaan ada masyarakat yang dinilai RTSM tidak terdata atau tidak masuk calon peserta PKH. Artinya pendataan dan penentuan prioritas sasaran dari program ini belum tepat. Kedua, mengenai besaran bantuan yang diterima. Masyarakat penerima program mengeluhkan adanya indikasi pemotongan penyaluran bantuan. Hal tersebut disebabkan besaran bantuan yang diterima.

Tabel 1.2 Anggaran Program Keluarga Harapan Tahun 2022-2024

Jumlah Keluarga Penerima Bantuan		Jumlah Anggaran (Rp)	
Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi
10.126	10.243	2.025.200.000	2.048.600.000
9.885	10.423	1.977.000.000	2.004.600.000
8.859	8.194	1.771.800.000	1.673.800.00

Sumber: Kementerian Sosial

Program Keluarga Harapan dialokasikan ke daerah yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan. Khususnya kepada masyarakat miskin di Kota Pematangsiantar, jumlah masyarakat miskin di Pematangsiantar sebagai berikut.

Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Penerima PKH Setiap Kecamatan di Pematangsiantar (2024)

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Penduduk Penerima PKH (KK)
Siantar Barat	44.511	778
Siantar Marimbun	13.060	462
Siantar Marihat	18.841	880
Siantar Selatan	20.367	489
Siantar Utara	40.372	1.398
Siantar Timur	40.854	1.228
Siantar Martoba	46.220	2.147
Siantar Sitalasari	32.920	882
JUMLAH	257.145	8.264

Sumber : Kementerian Sosial

Tabel 1.4 Jumlah Penduduk Penerima PKH di Setiap Kelurahan di Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar (2024)

Kelurahan	Penduduk Penerima PKH (KK)
Bantan	39
Banjar	166
Timbang Galung	354
Sippinggolpinggol	72
Teladan	18
Simarito	96
Proklamasi	33
JUMLAH	778

Sumber:Kementrian Sosial

Setiap KK yang menerima bantuan PKH akan mendapatkan dana sesuai kategori tertentu. KK yang memiliki anak SD menerima Rp.900.000 per tahun, anak SMP Rp.1.500.000 per tahun, anak SMA Rp.2.000.000 per tahun. Apabila dalam keluarga memiliki anak usia sekolah lebih dari satu maka dana yang diterima akan sesuai jumlah anak dikali dengan dana sesuai tingkat anak sekolah, misalnya ada 2 anak SMP dalam satu keluarga maka keluarga akan mendapatkan dana PKH adalah $Rp. 1.500.000 \times 2 = Rp. 3.000.000$.

Dari penelusuran yang dilakukan oleh media (klicktodaynews.com, 2020) ada masyarakat di salah satu Kecamatan Kota Pematangsiantar ada masyarakat yang berinisial ES (40) mengeluhkan jumlah dana PKH yang disalurkan oleh pemerintah, ”saya masih kesulitan untuk membiayai anak saya bang, selalu pendataan tapi jarang dapat saya bang, padahal saya punya 3 anak yang sekolah bang, saya tak tau kendalanya dimana bang” uangnya kesal.

Dampak kemiskinan menurut (Mubyarto, 2018) banyak anak yang tidak mengenyam pendidikan karena biaya pendidikan yang tinggi. Sehingga mengakibatkan anak turun kejalan untuk bekerja baik itu kemauan sendiri ataupun eksploitasi dari orang tua untuk menambah pendapatan keluarga. Khususnya di

Kecamatan Siantar Barat yang merupakan kawasan perkotaan dan bisa dibilang pusat dari perekonomian kota masih banyak terdapat anak-anak yang pada usia sekolah bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Diantara anak-anak usia sekolah itu ada yang tidak melanjutkan pendidikannya karena alasan biaya dan lebih memilih bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau keluarganya.

Dengan berlakunya PKH bidang Pendidikan di Kecamatan Siantar Barat pada tahun 2014 maka perlunya adanya koordinasi dari pihak yang terkait, agar dalam pelaksanaannya dapat menargetkan kepada program ini kepada penerima yang benar-benar layak dan berjalan sesuai tujuannya. PKH ini diharapkan agar bisa membantu RTSM di Kecamatan Siantar Barat supaya bisa mendapat pelayanan khususnya pendidikan.

Berangkat dari permasalahan yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “efektivitas PKH bidang pendidikan di Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar” sebagai salah satu syarat guna mencapai gelar sarjana pada jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh Lhokseumawe.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:.

1. Bagaimana efektivitas PKH bidang Pendidikan di Kecamatan Siantar Barat?
2. Apakah faktor-faktor yang memengaruhi efektifitas PKH bidang pendidikan di Kecamatan Siantar Barat?

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas dan rumusan masalah diatas, maka fokus penelitian dalam penelitian, yaitu:

1. Efektivitas Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan di Kecamatan Siantar Barat, meliputi:
 - a. Perluasan akses pendidikan bagi anak-anak RTSM untuk mendapatkan layanan Pendidikan yang layak.
 - b. Mencegah anak-anak RTSM dari kemungkinan putus sekolah.
 - c. Kesempatan belajar dari pemerintah untuk anak anak RTSM.
2. Faktor atau kendala yang dihadapi dalam efektivitas program keluarga harapan bidang Pendidikan di Kecamatan Siantar Barat, yaitu:
 - a. Tidak menggunakan dana yang diberikan untuk tujuan yang telah ditentukan.
 - b. Minimnya keterbukaan untuk mendapatkan informasi mengenai program keluarga harapan.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang sudah dipaparkan diatas, yaitu:

1. Untuk melihat sejauh mana efektivitas dari pelaksanaan PKH bidang pendidikan di Kecamatan Siantar Barat.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas PKH bidang Pendidikan Kecamatan Siantar Barat.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan dalam pembahsan tentang kebijakan publik dan informasi bagi masyarakat. Bagi pemerintah daerah Kota Pematangsiantar semoga penelitian ini dapat menjadi masukan dalam mengambil keputusan mengenai program PKH.